

Daftar Pustaka

A. Buku

- Annisa, A. S. (2014). *Warga Negara dan Penjara*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. London: Sage Publication.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor.
- International IDEA. (2018). *International IDEA Strategy 2018-2022*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Koesnoen, R. (1961). *Politik Pendjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2009). *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomis Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schumpeter, J. (2003). Capitalism, Socialism, and Democracy . Dalam S. C. Dahl, *The Democracy Sourcebook* (hal. 05-11). London: The MIT Press.
- Tim Pendamping Program Peduli. (2018). *Cerita Dari Negeri Inklusi: Sebuah Kidung untuk Keragaman Indonesia*. Jakarta: Renebook.

B. Skripsi dan Tesis

- Mufti, D. N. (2019). Menyelamatkan Hak Pilih Orang Yang Sakit Re-Design Penjaminan Hak Pilih Untuk Pasien Rumah Sakit Sebagai Upaya Mencapai Pemilu Yang Inklusif. *Electronic Thesis & Dissertation Univesitas Gadjah Mada*.
- Wibowo, A. E. (2017). Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan asal Kabupaten Kulon Progo di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta). *Electronic Thesis & Dissertation Univesitas Gadjah Mada*.

C. Jurnal

- Abebe, A. K. (2013). In pursuit of universal suffrage: the right of prisoners in Africa to vote. *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol.46, No.3*, 410-446.
- Beckamn, L. (2008). Who Should Vote? Cpnzeptualizing Universal Suffrage in Studies of Democracy. *Democratization 15:1*, 29-48.
- Marshall, P. (2015). Book Review C. Behan, Citizen Convict: Prisoners, Politics and the Vote. *European Journal of Probation Vol. 7 (1)*, 76-79.
- Muktiono. (2009). Penegakan Hak atas Demokrasi Kelompok Rentan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 16.

D. Peraturan Hukum

- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pasal 25 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)*.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Universal of Human Right 1948 tentang Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan KPU No. 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Mendagri No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Mendagri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No.20/PUU-XVII/2019.*

E. Internet

- Bawaslu. (2018, Januari 14). *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018.* Dipetik Desember 15, 2018, dari www.bawaslu.go.id
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2019, April 17). *Jumlah Penghuni UPT Lapas Kelas IIB Sleman.* Dipetik Februari 10, 2020, dari <https://www.smslap.ditjenpas.go.id>
- Ditjen Dukcapil Kemendagri. (2019, Februari 22). *Napi Luar Daerah Bisa Rekam KTP-el di Lapas Setempat.* Dipetik Mei 2020, 2020, dari <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/19289/Napi-Luar-Daerah-Bisa-Rekam-KTP-el-di-Lapas-Setempat>
- Faqir, A. A. (2017, Juli 11). *Pemutakhiran Data, KPU Kembali Aktifkan Sidalih untuk Pemilu 2019.* Dipetik Maret 17, 2020, dari <https://www.merdeka.com/>
- Jawapos.com. (2019, Maret 22). *5 Catatan Komnas HAM Soal Buruknya Penyelenggaraan Pemilu 2019 di SulSel.* Dipetik Mei 18, 2020, dari <https://www.komnasham.go.id/>

- KPU DIY. (2016, Desember 13). *Pemungutan Suara Di Ruang Tahanan*. Dipetik November 21, 2019, dari <https://diy.kpu.go.id/web/pemungutan-suara-di-ruang-tahanan/>
- Rachman, D. A. (2019, April 04). *Komunitas HAM Sebut Pemenuhan Hak Pemilih di Rutan dan Lapas Masih Ada yang Bermasalah*. Dipetik November 21, 2019, dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/17024681/komnas-ham-sebut-pemenuhan-hak-pemilih-di-rutan-dan-lapas-masih-ada-yang>
- Raditya, I. N. (2018, Februari 3). *Aksi Trunojoyo Melawan Mataram dan Dihukum Mati*. Dipetik Maret 06, 2020, dari <https://tirto.id/aksi-trunojoyo-melawan-mataram-dan-dihukum-mati-cD7T>
- Safutra, I. (2019, April 18). *Catatan Pemilu 2019 dari Komnas HAM Penghuni Lapas dan RS tidak Bisa Memilih*. Dipetik November 2019, 2019, dari <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/18/04/2019/penghuni-lapas-dan-rs-tidak-bisa-memilih>
- Surbakti, R. (2018, Januari 12). *Pemilu Inklusif*. Dipetik November 27, 2019, dari https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/12022018_Pemilu_Inklusif_Ramlan_Surbakti.pdf
- Komisi Nasional HAM. (2018, November 26). *Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Dipetik November 2019, dari [https://www.komnasham.go.id/files/20181126-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-\\$2J00.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20181126-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-$2J00.pdf)
- Komisi Nasional HAM. (2019, Desember 03). *Pemilu 2019: Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Dipetik Januari 2020, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2019/12/03/106/buku-laporan-akhir-pemilu-2019-pemenuhan-hak-konstitusional-warga-negara.html>
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. (2019, Oktober 10). *Buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Dipetik Desember 2019, dari <https://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=5676>

